

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Penelitian ini memiliki tujuan yaitu untuk menguji apakah terdapat pengaruh secara parsial dan simultan antara pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap pengalokasian anggaran belanja modal. Periode penelitian dalam penelitian ini yaitu 2010 dan 2012 dengan sampel penelitian yaitu laporan realisasi pemerintah daerah di Indonesia. Berdasarkan pengujian dan analisis yang telah dilakukan dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Secara parsial variabel yang memiliki pengaruh signifikan terhadap pengalokasian anggaran belanja modal pemerintah daerah 2010 dan 2012 adalah variabel pertumbuhan ekonomi dan pendapatan asli daerah. Sedangkan variabel dana alokasi umum berpengaruh tidak signifikan terhadap pengalokasian anggaran belanja modal pemerintah daerah periode 2010 dan 2012.
2. Pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap alokasi belanja modal dengan $t_{hitung} = -3,186$ dan tingkat signifikansi sebesar 0,002. Karena terbatasnya pendapatan yang dimiliki oleh pemerintah sementara beban untuk belanja lainnya semakin meningkat membuat pemerintah harus memprioritaskan belanja operasional dibandingkan belanja modal. Hal ini yang mengakibatkan pendapatan asli daerah tidak menjadi salah satu faktor yang penentu untuk alokasi belanja modal.

3. Pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh dengan arah positif terhadap pengalokasian anggaran belanja modal dengan $t_{hitung} = 6,196$ dan tingkat signifikansi sebesar 0,000. Hal ini dapat dijelaskan karena meningkatnya tambahan pembiayaan aset dari pertumbuhan ekonomi dapat mempermudah pengalokasian anggaran pemerintah daerah yang mana akan meningkatkan pengalokasian anggaran belanja modal.
4. Dana alokasi umum berpengaruh tidak signifikan terhadap pengalokasian anggaran belanja modal dengan $t_{hitung} = 0,654$ dan tingkat signifikansi sebesar 0,516. Masing-masing daerah memiliki kewenangan sendiri untuk menentukan kebijakan tata ruang yang dapat dimanfaatkan untuk investasi. Dalam hal ini dapat dijelaskan bahwa daerah yang memiliki dana alokasi umum yang besar belum tentu memaksimalkan potensi pembangunan di provinsinya sehingga dana alokasi umum bukan merupakan penentu dari anggaran untuk pengalokasian anggaran belanja modal.
5. Variable independen yang diajukan dalam penelitian ini adalah pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum mampu menjelaskan variabel dependen yaitu belanja modal sebesar 55,0%. Sedangkan sisanya sebesar 85,6% dipengaruhi oleh variable lain yang tidak terdapat dalam penelitian ini.

5.2 Keterbatasan Penelitian

1. Sampel yang tersedia hanya 22 pemerintah daerah provinsi dari 33 provinsi. Penelitian ini hanya dapat berfokus pada provinsi yang memiliki

anggaran dalam suatu provinsi, sehingga tidak mencakup seluruh populasi di Indonesia.

2. Rentang waktu data yang digunakan hanya tiga tahun, mungkin hasilnya akan lebih baik apabila data yang digunakan adalah data yang mempunyai rentang waktu yang lebih lama.

5.3 Saran Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang ada, maka saran yang dapat diberikan diantaranya adalah:

a. Bagi peneliti berikutnya:

1. Koefisien determinasi sebesar 55,0% menunjukkan masih terdapat banyak faktor lain yang mampu mempengaruhi besarnya pengalokasian anggaran belanja modal pemerintah daerah. Faktor lain yang bisa dimasukkan dalam penelitian ini adalah dana yang diberikan oleh pemerintah pusat untuk pemerataan pendapatan provinsi di Indonesia.
2. Penelitian selanjutnya diharapkan menambahkan variabel lain dalam laporan realisasi anggaran pemerintah daerah dan tidak berfokus pada variabel pertumbuhan ekonomi.

b. Bagi Pemerintah:

Diharapkan pemerintah memperhatikan alokasi untuk belanja modal yang mana akan memberikan manfaat untuk meningkatkan taraf perekonomian dari provinsi itu sendiri sehingga dapat memajukan perekonomian pada provinsi. Selain itu diharapkan pemerintah pusat merealisasikan batas maksimal untuk belanja modal dan batas minimum untuk belanja pegawai

sehingga tidak terjadi perbedaan yang sangat besar untuk belanja modal antara provinsi yang satu dengan lainnya.